

**STRATEGI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) UNTUK
PEMBENAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
DI KOTA SUKABUMI**

Oleh :

Syifa Maulida*, Yana Fajar FY Basori, Dian Purwanti

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*Email Korespondensi: syifamaulida653@ummi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini membahas tentang strategi relokasi pedagang kaki lima untuk pembenahan ruang terbuka hijau di Kota Sukabumi sehingga pemerintah daerah melakukan relokasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian bagaimana strategi relokasi pedagang kaki lima untuk pembenahan ruang terbuka hijau di Kota Sukabumi. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan Teknik analisis data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggambarkan kejadian secara umum mengenai masalah pedagang kaki lima di Kota Sukabumi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen strategi yang dilakukan Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman dan Satpol PP belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, dikarenakan Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman lebih terfokus pada satu sisi fungsi sedangkan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 terkait Penataan dan Pernerdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi masih melakukan pembinaan serta patrol rutin kepada para pedagang kaki lima yang melanggar aturan.

Kata Kunci : Strategi relokasi; RTH; PKL

Abstract

The purpose of this study is to discuss the strategy for relocating street vendors to improve green open spaces in Sukabumi City so that the local government relocates. Based on this, researchers are encouraged to conduct research on how to relocate street vendors to improve green open spaces in Sukabumi City. This type of research is qualitative with a descriptive approach that uses data analysis techniques by conducting interviews, observations, and documentation by describing general events regarding the problem of street vendors in the city of Sukabumi. The results of this study indicate that the strategic management carried out by the Housing and Settlement Spatial Planning Office and Satpol PP has not fully run optimally, because the Housing and Settlement Spatial Planning Office is more focused on one side of the function while the Satpol PP enforces Regional Regulation No. 10 of 2013 regarding Arrangement and Empowerment of street vendors in Sukabumi City are still conducting guidance and routine patrols to street vendors who violate the rules.

Keywords: Relocation strategy; green space; street vendors.

A. PENDAHULUAN

RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Selain untuk membentuk keindahan dan kenyamanan suatu perkotaan, fungsi utama RTH ialah sebagai bagian dari system sirkulasi udara, pengatur iklim mikro agar system sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung dengan lancar.

Di Kota Sukabumi dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Pemanfaatan dan Pemerdayan RTH dalam Peraturan Daerah tersebut RTH terdiri dari dua kategori, yaitu Ruang Terbuka Publik dan RTH Privat. Lalu ditetapkan presentase RTH yang harus dipenuhi oleh setiap wilayah yaitu sekurang-kurangnya 30% dari luas wilayah, dengan rincian 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.

Table 1.1 Jumlah Presentase RTH

NO	FASILITAS RTH	EKSISTENSI (Ha)	PRESENTASE
	RTH PUBLIK		
1	RTH Taman Kota	9,67	0,19
2	RTH Taman Rekreasi Cikundul	4,06	0,08
3	RTH Jalur & Median Jalan	10,34	0,21
4	RTH Hutan Kota	5,2	0,10
5	TPA	10,7	0,20

	Cikundul		
6	TPS3R	3,5	0,07
7	RTH Areal Pemakaman	34,58	0,71
8	RTH Lapangan Publik Kecamatan	7,00	0,14
	LUAS RTH PUBLIK	84,42	1,74
	RTH PRIVAT		
9	RTH Taman Lingkungan Perumahan	0,57	0,01
	LUAS RTH PRIVAT	0,57	0,01
	LUAS RTH TOTAL	84,99	1,76
	LUAS KOTA SUKABUMI	4842	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi 2019

Luas RTH Publik di Kota Sukabumi masih diangka 1,74%, yang mana idealnya bahwa RTH Publik yang harus dimiliki oleh suatu wilayah sebesar 20%. Adapun RTH Privat yang masih diangka 0,01% yang seharusnya RTH idealnya 10%. Hal tersebut membuktikan bahwa presentase RTH di Kota Sukabumi tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan masih terjadi selisih RTH Publik 18,26% sedangkan RTH Privat 9,99%.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Sukabumi Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2020	2021	2022
1	Baros	37 734,0	38 576,0	39 548,0
2	Lembursitu	41 432,0	42 196,0	43 098,0
3	Cibereum	44 961,0	46 025,0	47 247,0
4	Citamiang	53 049,0	53 511,0	54 154,0
5	Warudoyong	58 972,0	59 511,0	60 236,0
6	Gunungpuyuh	48 292,0	48 685,0	49 230,0
7	Cikole	61 885,0	62 294,0	62 897,0
Jumlah keseluruhan		346 325,0	350 804,0	356 410,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi, 2022

Jumlah penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2022 sudah mencapai angka 356,410,0 yang mana pada tahun 2020 mencapai angka 346,325,0 dan 2021 350,804,0. Dengan luas wilayah Kota Sukabumi yaitu 48 KM². Hal ini menjadikan Kota Sukabumi sebagai daerah yang jumlah penduduknya cukup padat. Dengan begitu pemerintah daerah seharusnya dapat memenuhi presentase RTH untuk menunjang tingkat presentase RTH di Kota Sukabumi.

Di Kota Sukabumi tempat-tempat ramai sangat mudah ditemui, sudut-sudut kota yang ramai dikunjungi masyarakat menjadi daya Tarik bagi PKL. Para PKL cenderung berusaha menempati lokasi yang bukan seharusnya mereka tempati, seperti trotoar, fasilitas umum seperti RTH. Permasalahan lain dari PKL ini adalah dengan menghasilkannya sampah yang akan mengotori RTH. Hal ini dapat menurunkan kualitas serta estetika RTH.

Adapun jumlah PKL di Kota Sukabumi berdasarkan Data Sektoral Daerah dan Statistik Kota Sukabumi pada tahun 2021, yaitu berjumlah 3.4350 yang sudah tersebar di Kota Sukabumi. Dari hasil pengamatan ini

bahwa PKL yang ada di Kota Sukabumi belum sepenuhnya tertata rapih dan bahkan mengambil lahan yang seharusnya buka diperuntukannya seperti mendiami kawasan RTH. Hal ini membuat fungsi utama RTH tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Dari hal tersebut, muncul beberapa fenomena masalah dalam merelokasikan PKL untuk pembenahan RTH. Yang pertama adalah pengamatan lingkungan yang kurang diperhatikan, pemerintah daerah yang belum bisa memenuhi presentase dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Yang kedua yaitu perumusan strategi yang belum efektif. Pemerintah daerah sudah melakukan relokasi terhadap PKL yang mendiami Kawasan RTH, akan tetapi masih terdapat beberapa PKL yang kembali mendiami RTH. Hal ini harus diperhatikan pemerintah daerah agar strategi relokasi bisa efektif.

Yang ketiga yaitu implemetasi strategi yang belum tercapai. Dalam peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2015 mengenai penyediaan dan pemerdayaan RTH, tujuannya untuk keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup di daerah selanjutnya yang dapat meningkatkan ketersediaan udara

bersih yang diperlukan masyarakat serta dapat meningkatkan estetika perkotaan. Akan tetapi faktanya hingga saat ini RTH presentase RTH tidak terpenuhi serta fasilitas yang diperuntukan untuk dinikmati masyarakat diambil alih oleh PKL, yang mana dalam peraturan daerah No 10 Tahun 2013 mengenai penataan dan pemerdayaan PKL, yang seharusnya penataan terhadap PKL dapat dilakukan, namun hal ini belum tercapai.

Fenomena masalah yang terakhir yaitu keterbatasan evaluasi dan pengendalian, terdapat beberapa PKL yang masih mendiami RTH dan mengambil fasilitas RTH serta kurangnya ketegasan terhadap PKL yang mendiami Kawasan RTH serta sanksi yang diberikan hanya sanksi administrative yang tidak ada akan efek jera.

Berdasarkan fenomena masalah yang sudah diuraikan pada bagian pendahuluan, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian skripsi. Oleh karenanya, peneliti mengajukan penelitian Skripsi dengan judul “Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Untuk Pembenahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Sukabumi”.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Creswell (2021:4-5) “Penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang-orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan Upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian kualitatif harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.”

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mencari makna terkait strategi relokasi PKL untuk pembenahan RTH yang berawal dari pandangan para partisipan, kemusia dalam prosesnya, peneliti akan menganalisis isu tersebut yang berhubungan dengan masalah sosial dengan mengaplikasikan Upaya-upaya penting, yakni dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada partisipan serta dapat mengumpulkan data yang kemudian di analisis dan dimaknai menggunakan pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian kualitatif semuanya berawal dari data yang didapatkan dan harus valid, kemudian dalam rencana penelitian ini, untuk melakukan validasi data yang diteliti dengan Teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik validasi data dengan cara memeriksa atau membandingkan data atau informasi yang tersedia dengan sumber yang lain untuk diketahui kebenarannya, hal ini disebutkan oleh Moleong (2017:330). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Dinas Tata Perumahan dan Permukiman Kota Sukabumi, Satpol PP, dan perwakilan PKL. Selanjutnya untuk menentukan informan ini dengan menggunakan teknik *snowball sampling*.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti perlu menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dapat dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan oleh Miles & Huberman (2014:18), yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Wheelen dan Hunger (2003:9) mengemukakan bahwa manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Wheelen dan Hunger (2003:9) juga menyebutkan bahwa langkah pertama dalam merumuskan strategi adalah pernyataan misi, yang berperan penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Berikut adalah kriteria manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger (2003:9), yang digunakan terdiri dari empat kriteria, yaitu :

Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan yang berdasarkan observasi awal, peneliti

memfokuskan pada Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Kota Sukabumi mengenai pengamatan lingkungan. Informan 1 menjelaskan bahwa belum terpenuhinya RTH di Kawasan perkotaan, harus dilihat dari fungsinya, dan juga Ketika berbicara mengenai luasan RTH masih tidak terpenuhi dikarenakan yang pertama lahan yang buka milik pemerintah daerah, jika pembangunan tetap dilakukan maka yang terjadi akan menimbulkan kesalah pahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang kedua yaitu anggaran yang belum tersedia, walaupun pemerintah daerah menyediakan lahan untuk pembangunan RTH, maka anggaran pemerintah daerah juga harus sudah ada.

Walaupun RTH tidak terpenuhi akan tetapi jika masyarakat cukup nyaman dengan RTH yang di Kota Sukabumi tapi hanya secara fungsi sosial (ekstrinsik) maka itu bisa dikatakan sudah terpenuhi, karena presentase 20% dapat tergantikan ketika fungsinya sudah dirasakan serta melayani masyarakat Kota Sukabumi. Akan tetapi, walaupun sudah dikatakan terpenuhi tapi dari segi intrinsic masih tidak terpenuhi dikarenakan fasilitas lahan pemerintah daerah yang terbatas serta beberapa masyarakat Kota Sukabumi juga belum banyak yang menyadari adanya RTH di Kota Sukabumi.

Namun demikian, perencanaan Kota Sukabumi juga sedang berada ditahap berbenah dengan meningkatkan kualitas RTH, salah satunya dengan adanya pembangunan di depan Gedung

Juang Kota Sukabumi. Hal itu menunjukkan salah satu perencanaan Kota Sukabumi dengan adanya revitalisasi Gedung Juang yang merupakan bagian dari memperindah suatu perkotaan serta salah satu bagian dari kualitas RTH yang menjadikan daya tarik bagi masyarakat Kota Sukabumi.

Perumusan Strategi

Perumusan strategi ialah pembangunan rencana jangka Panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Terkait dengan PKL yang berada di Kawasan RTH, informan 1 menyebutkan pemerintah daerah hanya bisa menghimbau dengan adanya kolaborasi dari Satpol PP, walaupun sudah diberikan himbauan akan tetapi PKL tetap berjualan di Kawasan RTH serta kebanyakan PKL yang berjualan dikawasan RTH adalah pedagang dari luar Kota Sukabumi. Sedangkan menurut informan 2 menjelaskan bahwa RTH dengan PKL, dimana kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari masyarakat. Pada dasarnya PKL yang berjualan dikawasan RTH akan menghasilkan sampah bekas dagangannya dan akan mengotori fasilitas RTH, maka dari itu masyarakat dapat membantu dengan cara membuang sampah pada tempatnya agar RTH tidak kotor.

Informan 2 juga menambahkan menjelang akhir pekan pemerintah daerah akan memberikan himbauan kepada PKL seperti yang berjualan gorengan agar minyak yang dipakai tidak berceceran dan mengotori RTH, agar masyarakat dapat

menikmati fasilitas tersebut. Selanjutnya informan 3 menyatakan bahwa strategi yang dilakukan belum ada akan tetapi masih dilakukannya penertiban, sebelum penertiban biasanya akan dilakukan komunikasi terlebih dahulu dengan PKL bahwa tempat ini tidak boleh ditempati serta masih dilakukannya patrol rutin dan melakukan penataan agar PKL tidak masuk ke Kawasan RTH.

Implementasi Strategi

Implementasi strategi ini dimaksud merupakan salah satu factor yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan, karena pada dasarnya setiap kebijakan mempunyai target waktu yang harus diselesaikan dan juga mempunyai tujuan yang akan dicapai untuk kepentingan publik.

Informan 1 dan 2 menyebutkan bahwa proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan mikrolat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Informan 2 juga menambahkan bahwasanya RTH di Kota Sukabumi masih jauh diangka 30% yang sesuai dengan kebijakan, akan tetapi hal itu bisa teratasi jika fungsi sosial pada RTH dapat dirasakan serta dapat melayani masyarakat Kota Sukabumi.

Selanjutnya informan 3 menyebutkan bahwa pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 mengenai penataan dan pemerdayaan PKL tujuannya untuk memberikan usaha untuk PKL dengan menempatkan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan juga

dapat mewujudkan suatu kota yang bersih, tertib dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, namun hal itu belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan fasilitas yang belum memadai. Untuk sementara waktu PKL ini akan dipindahkan ke halaman pasar, hal ini dapat mengurangi jumlah PKL yang menempati lokasi yang bukan diperuntukkannya termasuk Kawasan RTH.

Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian yang dimaksud merupakan tahapan akhir dari manajemen strategi, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui informasi mengenai kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik, strategi sangat diperlukan untuk modifikasi dimasa depan, sebab lingkungan akan secara konstan selalu berubah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 mengenai pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan perkotaan, penyediaan fasilitas umum RTH dapat dilihat dari kebutuhan fungsi tertentu, hal ini termasuk kategori untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana seperti melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman bagi masyarakat serta membatasi penggunaan lahan agar fungsi utama RTH tidak terganggu.

Pemerintah daerah sempat memberikan fasilitas untuk PKL yang berada di Jl. Ahmad Yani, akan tetapi PKL tidak menempati fasilitas tersebut, dikarenakan PKL lebih memilih tempat yang terdapat

keramaian seperti RTH karena perputaran ekonomi bagi PKL lebih menguntungkan. Akan tetapi Satpol PP masih tetap melakukan pembinaan, pengawasan serta patrol rutin dan Upaya terakhir yang dilakukan adalah direlokasikan. Selanjutnya terdapat pernyataan dari sisi PKL, bahwa setiap PKL akan mencari lokasi yang terdapat keramaian, karena disitulah perekonomian dapat berputar. Walaupun PKL sudah diberikan fasilitas, akan tetapi PKL ini tetap berjualan di Kawasan RTH walaupun ini adalah salah satu bentuk melanggar aturan, selagi PKL dapat menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas RTH.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi yang dilakukan Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman dan Satpol PP belum sepenuhnya optimal, dikarenakan Dinas Tata Ruang Perumahan dan Permukiman lebih terfokus pada satu sisi fungsi sedangkan Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 terkait penataan dan pemerdayaan PKL di Kota Sukabumi masih melakukan pembinaan serta patrol rutin kepada para PKL yang melanggar aturan. Apabila dilihat berdasarkan empat dimensi manajemen strategi ialah 1) pengamatan lingkungan, RTH di Kota Sukabumi masih tidak terpenuhi, namun teroenuhi atau tidaknya RTH dapat dilihat dari fungsinya, jika masyarakat cukup nyaman dengan fasilitas RTH di Kota Sukabumi, tapi hanya secara

fungsi sosial, hal itu dapat dikatakan terpenuhi. 2) perumusan strategi, pemerintah daerah hanya bisa menghimbau dengan adanya kolaborasi dengan Satpol PP. namun saat ini Satpol PP masih belum ada strategi yang harus dilakukan, namun begitu Satpol PP tetap melakukan patrol rutin serta melakukan komunikasi dengan PKL sebelum melakukan penertiban. 3) implementasi strategi, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 bahwa proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, namun RTH di Kota Sukabumi masih jauh diangka 30% yang sesuai dengan kebijakan, namun hal tersebut dapat teratasi jika fungsi sosial pada RTH dapat melayani masyarakat. 4) evaluasi dan pengendalian, RTH dikawasan perkotaan menyediakan fasilitas umum dan RTH dapat dilihat dari kebutuhan fungsi tertentu. Hal ini termasuk pada kategori untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan bagi masyarakat serta membatasi penggunaan lahan agar fungsi utama tidak terganggu. Fasilitas ini juga dapat meningkatkan fasilitas perkotaan, akan tetapi fasilitas tersebut justru diambil alih yang bukan diperuntukkannya yaitu PKL, walaupun begitu pemerintah daerah rutin melakukan pengawasan serta penertiban.

Solusi yang disarankan peneliti yaitu: 1) Pemerintah daerah dapat memenuhi presentasi ruang terbuka hijau dari fungsi intrinsik dan ekstrinsik, jangan mengadal dari satu sisi saja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, 2)

Adanya ketegasan untuk para pedagang kaki lima, karena sanksi yang digunakan masih sanksi administratif hal tersebut tidak akan membuat efek jera bagi pedagang kaki lima, 3) Adanya sosialisasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat, karena masih banyak masyarakat Kota Sukabumi yang belum mengetahui ruang terbuka, dan 4) Adanya pembangun fasilitas yang memadai, agar tidak ada penyalahgunaan fasilitas antara ruang terbuka hijau dan pedagang kaki lima

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Ridlo, Muhammad. (2001). *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang: Unisulla Press
- Creswell, John W. (2021). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damsar, (2002). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Dress, Gregory G, dkk, (2010). *Strategic Management Creating Competitive Advantages*. New York: McGraw-hill
- Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Direktorat Jendral Penataan Ruang
- Hariato, dan Sudomo. (2001). *Pendapatan, Harga dan Konsumsi Beras : Bunga Rampai Ekonomi Beras*. Jakarta: Direktorat Jendral Penataan Ruang
- Hunger, J.D, dan Wheelen, T.L. (2003). *Manajemen Strategis*. Terjemahan. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Husein, Umar. (2013). *Desain Penelitian*

- Manajemen Strategi*. (Cet.2). Jakarta: Rajawali Pers
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Grayamedia
- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan
- McGee, T. G dan Y. M. Yeung. (1997). *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*. Ottawa: internasional Development Research Centre
- Miles, M.B. Huberman, A.C. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan. Jakarta: UI-Press
- Moleong, J. lexy. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offse
- Mufiz, Ali. (2016). *Pengantar Ilmu Administrasi Nrgara*. Jakarta: Graha Ilmu
- Salusu. (2003). *Pengambilan Keputusan Strategic Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Rasindo
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Siagian, Sondang. P. (2012). *Manajemen Stratejik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert. (1989). *Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Taufiqurokhman. (2016). *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Wijaya, Andy Fefta, dan Danar, Oscar Radyan. (2014). *Manajemen Publik Teori dan Praktik*. Malang: UB-Press
- Wahyudi Sri, Agustisnus. (1996). *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara